

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Agusta, Ivanouich. *Teori Kekuasaan, Teori Sosial, Dan Teori Ilmuan Sosial Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Ahmad Rofiq, Pujiyono, Asas Strict Liability sebagai Penyeimbang Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia, *Journal Of Judicial Review*. JJR 24(2) December 2022, 319-332
- Andi Bau Mallarangeng, Dkk, “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Legal: Journal Of Law*, Vol.2 No.2, November 2023
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008,
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada 2015
- Arbijoto. *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*. Diadit Media, Jakarta, 2010
- Aris Munandar Ar, dkk, Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol. 1, No. 3 Oktober 2024
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali, M. Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi* Perss cetakan kedua, Jakarta, 2012,
- Asyikin, Nehru. “Pengawasan Publik Terhadap Pejabat Publik Yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 March 31, 2020
- Atmasasmita, Romli. *Asas-Asas Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Sinar Grafika: Jakarta, 1991
- Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, 2016
- Cekli Setya Pratiwi, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*”. JSSP, 24 Febuari 2020
- Chairul huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan'menuju kepada'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2011,
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012,
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018,
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm 23
- D. Siimons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, (Titeil asli: Leerboek van het Nederlandse Strafrecht)*, Diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, Bandung: Pioner Jaya, 1992.
- Danil, Elwi, *Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- David Lind Budijanto Njoto. Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Volume 7, Nomor 3, Maret 2024
- Ekky Aji Prasetyo<sup>1</sup>, Sahuri Lasmadi<sup>2</sup>, Erwin. Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*. Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Vol. 7 No. 1, Juni 2024, hlm. 377.
- Elidar Sari. *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Biena Edukasi. Jakarta, 2013,
- Hadjon, Philipus M., dkk. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2012.

- Hamidi, Jazim, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015
- Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, (Terjemahan Raisul Muttaqien), Bandung: Nusa Media, 2008,
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- idwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Ikhwan Noufal M.H, “Formulasi Dan Penafsiran (Interpretasi) Hukum Terhadap Unsur Mens Rea Tindak Pidana Korupsi Dalam Uu Nomor 20 Tahun 2001 Jo Uu Nomor 31 Tahun 1999 (Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3).
- Ikhwan Noufal M.H, “Formulasi Dan Penafsiran (Interpretasi) Hukum Terhadap Unsur Mens Rea Tindak Pidana Korupsi Dalam Uu Nomor 20 Tahun 2001 Jo Uu Nomor 31 Tahun 1999 (Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3).
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 160
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003),
- Kevin. D Zega. *Titik Singgung Tindak Pidana Korupsi dengan Hukum Administrasi Negara*. Penerbit MaPPI. Buku Ajar, Jakarta, 2022
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018,

- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung:P.T ALUMNI, 2012,
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Made I Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. II, Kencana: Jakarta, 2016,.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017,
- Maulana Fahmi Idris & Dian Karisma. *Hukum Pidana*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja Sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer, 2024. Semarang
- Mochammad Kasman S, Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti. *Locus Journal of Academic Literature Review*. Volume 4 Issue 3, June 2025. P-ISSN: 2829-4262, E-ISSN: 2829-3827
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2022
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Pidana*, Yogyakarta: Seksi Keipidanaan FH UGM, 1969.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1983,
- Muhammad Hatta. *Kedudukan Hukum Whistle-Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Cendekia, Jurnal Hukum Sosial dan Huminiora, 2024
- Muhammad Hatta. *Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi Di Indonesia*. Cv Sefa Bumi Persada. Jakarta, 2020
- Muhammad Yasin Ali Gea, Agusmidah& Rosmalinda. Analisis Sosiologi Hukum atas Penyalahgunaan Wewenang Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif Anomie dan Realisme Hukum. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Vol. 12. No. 2. Desember 2025,
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2015.

- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2015.
- Philipus M. Hadjon, dkk. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2012,
- Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink, dan J.B.J.M. Ten Berge. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya, 2011,
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020,
- Guna Menciptakan Sinergitas & Harmonisasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah”, tanpa tempat, 2 Desember 2010.
- Seno, Adji Indriyanto. *Korupsi dan Penegakkan Hukum*. Diadit Media, Jakarta, 2009
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press: Jakarta, 2006,
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2018
- Zainal Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta, 2009

## **B. JURNAL/TESIS**

- Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, dan Ismail Ali, Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng. *LEGAL: Journal of Law*. Vol.2 No.2, November 2023, 11-24 / ISSN 2829-6672.
- Ahmad Rofiq, Pujiyono, Asas Strict Liability sebagai Penyeimbang Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia, *Journal Of Judicial Review*. JJR 24(2) December 2022.
- Aris Munandar Ar, dkk, Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia, JIMMI: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol. 1, No. 3 Oktober 2024.
- Andi Bau Mallarangeng, Mustari, dkk. Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *LEGAL: Journal of Law*. Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng. Vol.2 No.2, November 2023.

- Asyikin, Nehru. "Pengawasan Publik Terhadap Pejabat Publik Yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 March 31, 2020, hlm. 80.
- David Lind Budijanto Njoto. Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Volume 7, Nomor 3, Maret 2024.
- Ekky Aji Prasetyo<sup>1</sup>, Sahuri Lasmadi<sup>2</sup>, Erwin. Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*. Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Vol. 7 No. 1, Juni 2024.
- Faure, M. G., & Schaffmeister, D. "Kekhawatiran Masa Kini" Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek. *Indonesian Journal of International Law*, 2(2), 2004, 394-395.
- Ikhwan Noufal M.H, "Formulasi Dan Penafsiran (Interpretasi) Hukum Terhadap Unsur Mens Rea Tindak Pidana Korupsi Dalam Uu Nomor 20 Tahun 2001 Jo Uu Nomor 31 Tahun 1999 (Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3).
- Karolus Charlaes Bego, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Perspektif Hukum Administrasi Negara. Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM. *Jurnal Kalaboratif Sains*. Volume 7 No. 10, Oktober 2024, 3785-3789.
- Moh. Alfatah Alti Putra. Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana. Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sorong. *Jurnal Justici*. Vol 7. No 2.
- Mochammad Kasman S, Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti. *Locus Journal of Academic Literature Review*. Volume 4 Issue 3, June 2025. P-ISSN: 2829-4262, E-ISSN: 2829-3827.
- Muhammad Yasin Ali Gea, Agusmidah& Rosmalinda. Analisis Sosiologi Hukum atas Penyalahgunaan Wewenang Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif Anomie dan Realisme Hukum. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Vol. 12. No. 2. Desember 2025.
- Muhammad Hatta. *Kedudukan Hukum Whistle-Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Cendekia, Jurnal Hukum Sosial dan Huminiora, 2024.
- Nur Laila, Marhatun Fatonah, Nur Rahmah, Seberapa Penting Terpenuhinya Unsur Mens Rea Dalam Penetapan Perkara Pidana Pada Kasus Korupsi Di Indonesia. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah,

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Triwikrama: *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*. Volume 10 No 12, 2025.

Petrus CKL Bello, Sakhah Hukum Yang Buruk Secara Moral Perdebatan Antara Lon Luvois Fuller Dan H.L.A. Hart. Advokat Law Firm Bello & Partners, Jakarta, Indonesia. *Honeste Vivere Journal*. Volume 33 Issue 2, 2023. P-ISSN: 0215-8922, E-ISSN: 2963-9131.

Putri Martha Jenifer Kiara2Asmak Ul Hosnah, Analisis Yuridis Terhadap Ketidadaan Unsur Mens Rea Dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi Thomas Trikasih Lembong Dan Relevansinya Dengan Pemberian Abolisi Oleh Presiden. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran.*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Volume. 8. Nomor 3, 2025.

Putri Nurmala Sari Siahaan. *Elements Testings Distortion of the Abuse of Authority Based on the Government Administration Law and Corruption Crime. CORRUPTIO*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung. Volume 02 Issue 1, January-June 2021.

Riza Aldia Gusliha, Joelman Subaidi, Tengku Yudi Afrizal. Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan No : 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki). Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 8. No. 1. 2025.

Seno Adji, Indriyanto. “Korupsi: Kriminalisasi Kebijakan Negara?” Makalah disampaikan Pada Diskusi Panel dengan Topik “Kebijakan Aparatur Negara & Pertanggungjawaban Pidana”, Pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan tema “Revitalisasi Peran Gubernur Guna Menciptakan Sinergitas & Harmonisasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah”, tanpa tempat, 2 Desember 2010.

## **B PERATURAN-PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

PERMA No. 4 Tahun 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan pengadilan yang menjadi studi kasus (misalnya perkara Tom Lembong).